

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505293-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601420-26012023155537

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bobprmitrabudikusuma@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-26 15:55:37



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



**BPR MITRA**

PT. BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI

Nomor : 0010/MBM/DIR/OJK/1/23  
Lampiran : 1 lembar

Kudus, 30 Januari 2023

**Yth. Kantor Otoritas Jasa Keuangan  
Regional 3 Jawa Tengah dan DIY  
Jl. Kyai Saleh No, 12-14 Mugasari,  
Semarang.**

*Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola*

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bersama ini kami kirimkan *Laporan Tata Kelola Tahun 2022*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri  
Direksi,

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI

**Anita Adelina**  
Direktur Utama

**Kantor Pusat :**

Jl. Raya Kudus - Colo Km. 3 Bae, Kudus. Telp/Fax. 0291.434637  
Email : bprmitrabudikusuma@gmail.com

**Kantor Kas :**

Jl. Raya Kudus - Jepara, Jetak, Kaliveungu, Kudus. Telp. 0291.431210

**BANK SAHABAT ANAK NEGERI**



Nomor : 0011/MBM/DIR/EX/1/23  
Lampiran : 1 lembar

Kudus, 30 Januari 2023

**Yth. Perbarindo DPD Jateng – Yandora**  
**Jl. Sendangsari Utara XIII No.187, Kalicari**  
**Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah**

*Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola*

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bersama ini kami kirimkan *Laporan Tata Kelola Tahun 2022*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri  
Direksi,

  
 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI  
**Anita Adelina**  
Direktur Utama

**Kantor Pusat :**

Jl. Raya Kudus - Colo Km.3 Bae, Kudus. Telp/Fax.0291.434637  
Email : bprmitrabudikusuma@gmail.com

**Kantor Kas :**

Jl. Raya Kudus - Jeparu, Jetak, Kaliwungu, Kudus. Telp. 0291.431210

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : JALAN RAYA KUDUS COLO KM 3 DESA PURWOREJO BAE  
KUDUS

Nomor Telepon : 0291-434637

Penjelasan Umum : Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut maka BPR berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) pada setiap jenjang perusahaan. Tata kelola perusahaan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 04/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Lima prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan GCG, yaitu : 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 3. Pertanggung-jawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 4. Profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPR. 5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Anita Adelina	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank Perkreditan Rakyat yaitu prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh jenjang organisasi BPR; Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya; Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Menunjuk Pejabat Eksekutif untuk pelaksanaan fungsi kepatuhan fungsi manajemen risiko dan Satuan Kerja Audit Intern, yang independen terhadap operasional BPR; Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai; Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar; Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi;

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1. Direksi selalu berupaya dalam memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi salah satunya melalui evaluasi kebijakan, sistem, dan kinerja secara berkala. 2. Direksi selalu berupaya dalam menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dekom, dan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR dilakukan setiap tahun. In

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10  
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Haryanto	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat sepuluh hari kerja apabila terjadi; Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR termasuk hal atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambil alih LPS, dan/atau dicabut ijin usahanya.; Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar; Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit satu kali dalam satu tahun dengan kehadiran langsung.
2	Tatang Sigit Mugiono	Komisaris	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat sepuluh hari kerja apabila terjadi; Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR termasuk hal atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambil alih LPS, dan/atau dicabut ijin usahanya.; Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar; Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit satu kali dalam satu tahun dengan kehadiran langsung.

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rekomendasi dewan Komisaris ; Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi yaitu agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan antara lain : a. Dengan lebih agresifnya pelepasan kredit agar tetap tidak melenceng dari prinsip kehati-hatian. b. Selain pertumbuhan bisnis yang cukup berat tentunya penurunan NPL diupayakan melalui eksekusi agunan secepatnya. c. Pelaporan eksternal kepada OJK maupun LPS agar tetap diperhatikan ketentuannya. d. Pengembangan SDM bagi pengurus maupun karyawan agar tetap dilakukan dan dikembangkan. e. Perhatikan kebutuhan SDM dalam jangka waktu panjang. f. Seleksi nasabah melalui verifikasi dan update data nasabah senantiasa dilakukan. g. Meningkatkan promosi untuk meningkatkan produk simpanan BPR. h. Peningkatan tingkat kualitas analisa oleh marketing terhadap calon debitur. i. Melakukan perluasan area pemasaran namun tetap berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. j. Melakukan perbaikan dalam sistem dan prosedur yang mengatur tentang operasional BPR. k. Tindak lanjut temuan OJK secepatnya. l. Peningkatan aktivitas pengumpulan dana murah. m. Kebutuhan kecukupan modal yang telah masih harus dipenuhi pemegang saham agar dipantau sehingga posisi kecukupan modal terpenuhi. \n

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Audit	Tidak ada
2	Komite Pemantau Risiko	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Nama Karyawan	kompetensi dan/atau pengalaman masing masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)						
tidak ada						

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	tidak ada	tidak ada	0
2	Komite Pemantau Risiko	tidak ada	tidak ada	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Anita Adelina	1	0,01

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki saham di BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Anita Adelina	abc	10,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Anita Adelina	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Anita Adelina	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Haryanto	1	0,01
2	Tatang Sigit Mugiono	1	0,01

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisari tidak memiliki saham pada BPR Mitra Budikusuma mandiri



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Haryanto	tidak ada	0,01
2	Tatang Sigit Mugiono	tidak ada	0,01

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Haryanto	tidak ada	tidak ada	Haryanto - KUD Bae
2	Tatang Sigit Mugiono	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama merupakan Ketua dari KUD Bae

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Haryanto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Tatang Sigit Mugiono	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan Keluarga pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	188400000	2	124800000
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		188400000		124800000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas lainnya	Lainnya	Lainnya

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas Lainnya yang diberikan berupa fasilitas Pinjaman pengurus dengan ketentuan rate dibawah rate kredit non pengurus, dan diatur berdasarkan kebijakan yang sudah ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,08	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	15,70	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,60	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,06	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	18-04-2022	4	Evaluasi kinerja di Triwulan I, pembahasan hasil Audit KAP, penyelenggaraan RUPS, peningkatan kualitas kredit
2	17-06-2022	4	pencapaian Laba bersih, pembahasan hasil fit & proper test calon direktur bisnis, penguatan SDM dengan edukasi dan promosi, fokus kualitas kredit, penyelesaian AYDA, penambahan NOA Deposito.
3	21-12-2022	11	Evaluasi RBB (Realisasi RBB 2022, pencapaian budget 2022), Evaluasi Kinerja karyawan selama tahun 2022 dan peningkatan kesejahteraan karyawan, evaluasi NPL terkait agunan, Antisipasi biaya dana yang cukup tinggi, fokus untuk agunan SHM untuk plafond 50 juta keatas agunan BPKB sebagai pelengkap

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Haryanto	3	0	100,00
2	Tatang Sigit Mugiono	3	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Drs. H. Haryanto	Komisaris Utama	Anita Adelina	Direktur Utama	Sewa Gedung	54	Gedung yang disewa untuk kegiatan operasional bank sejak BPR Mitra Budikusuma Mandiri didirikan adalah milik KUD Bae yang notabene salah satu pemegang saham BPR Mitra Budikusuma Mandiri. BPR sudah melakukan pembelian tanah untuk pendirian gedung baru, tetapi belum mendapatkan persetujuan RUPS.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220107	Kegiatan Sosial	Sumbangan anak pengurus KUD	Pengurus KUD	1.000.000
2	20220222	Kegiatan Sosial	Sumbangan uang duka	Dirut BPR Bali Srisedena Mandiri	750.000
3	20220428	Kegiatan Sosial	THR petugas kebersihan	Petugas kebersihan (Bpk. Ali)	200.000
4	20220428	Kegiatan Sosial	Bantuan THR	Desa Purworejo	150.000
5	20220622	Kegiatan Sosial	Bantuan Pemasangan Lampu Jalan kantor	Pemilik gedung Kantor Kas	500.000
6	20220628	Kegiatan Sosial	Sumbangan Partisipasi Pembagian sembako (LSM)	LSM	100.000
7	20220711	Kegiatan Sosial	Sumbangan Lia & Irin Perbarindo	Perbarindo	500.000
8	20220808	Kegiatan Sosial	Sumbangan Dukcit	Faruq Jember	500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

3700000

Nama BPR	: PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: JALAN RAYA KUDUS - COLO KM 3
Nomor Telepon	: 0291-434637
Modal Inti BPR	: 4.167.824.211,00
Total Aset BPR	: 27.866.569.289,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,9
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Hasil penilaian penerapan Tata Kelola BPR menunjukkan nilai komposit 2 dan predikat komposit Baik. Penerapan Tata Kelola tahun 2022 mengalami peningkatan nilai komposit dibanding tahun sebelumnya, hal ini diengaruhi oleh pemenuhan Sistem dan prosedur atau kebijakan yang lebih memadai pada setiap unit kerja. Terdapat beberapa kelamahan dalam penerapan Tata Kelola 2022, diantaranya terjadinya kekosongan jabatan Direktur Bisnis. BPR telah melakukan upaya melalui pencalonan Direksi, tetapi calon yang diajukan belum memenuhi kriteria Otoritas Jasa Keuangan. Terjadinya benturan kepentingan pada fungsi kredit akibat kekosongan jabatan. Terjadinya benturan kepentingan terkait transaksi sewa bangunan. Adapun rencana tindak dari kelemahan tersebut antara lain, pemenuhan Direktur Bisnis pada tahun 2023. Dengan terpenuhinya jumlah anggota Direksi, Fungsi Loan Komite dapat kembali dijalankan. Untuk kekuatan dari penerapan Tata Kelola 2022 antara lain, terdapat sistem dan prosedur yang memadai di setiap unit kerja sehingga mendukung pelaksanaan tugas dari setiap fungsi unit kerja tersebut. Penguatan jumlah AO sebagai upaya peningkatan aset Bank. Pemantauan BMPK dilakukan kepada setiap debitur pada saat pengajuan kredit sehingga mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran BMPK. Dilakukan pula pelaporan terkait pelanggaran BMPK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,67	1,00	0,20	1,87	0.374	Jumlah anggota Direksi belum sesuai aturan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas secara independen. Direksi melaksanakan bagian dari tugas dan tanggungjawabnya, yang meliputi tindak lanjut atas temuan audit, menyediakan data & informasi kepada Dewan Komisaris, peningkatan SDM melalui pembelajaran & pelatihan dalam pengembangan kualitas individu, menyampaikan laporan sesuai jadwal pelaporan, serta mempertanggungjawabkan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS yang diadakan 1 tahun sekali.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,89	0,70	0,20	1,79	0.269	jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sesuai aturan OJK. Dalam melaksanakan Tata Kelola perusahaan, Dewan Komisaris mengemban tugas dalam pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR melalui Rapat Dewan Komisaris & Rapat Pengurus.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR belum memiliki Komite Audit & Komite Pemantau Resiko
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,30	2,60	0.260	BPR selalu berupaya untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan. BPR akan melakukan pengungkapan terhadap setiap benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,80	0,80	0,20	1,80	0.180	Bank memiliki pedoman terkait Fungsi Kepatuhan. Fungsi Kepatuhan tidak menangani penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu mengupayakan terciptanya budaya kepatuhan BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,70	0,80	0,18	1,68	0.168	fungsi audit intern memiliki pedoman kerja serta sistem & prosedur untuk pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang - undangan. Fungsi audit intern bersikap independen dan menyampaikan laporan pelaksanaan & pokok - pokok hasil audit intern kepada Direktur Utama & Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Fungsi Audit Intern melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap satu tahun sekali.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,40	0,10	1,50	0.038	KAP terdaftar pada OJK, dan memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Hasil audit & Management Letter menggambarkan permasalahan bank.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,74	0,10	1,68	0.168	BPR telah memiliki sistem & prosedur terkait Management Risiko. BPR memiliki sistem informasi yang cukup memadai, lengkap, dan akurat untuk pemenuhan data dalam pembuatan Laporan Profil Risiko yang secara rutin disampaikan kepada Otoritas jasa Keuangan.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,60	0,10	1,70	0.128	BPR telah memiliki sistem & prosedur terkait BMPK yang tertuang pada SOP Kredit PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri. BPR melakukan pemantauan terkait pelanggaran BMPK melalui lembar opini yang dibuat oleh Fungsi Kepatuhan, yang melekat pada proposal kredit. BPR telah melakukan pelaporan terkait pemberian kredit kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	Rencana Bisnis BPR disusun dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis BPR memiliki cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR. Perubahan atas Rencana Bisnis BPR disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	BPR melakukan pelaporan terkait kondisi keuangan dan non keuangan melalui Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPR melakukan transparansi produk dan layanan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	belum memenuhi
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	sudah memenuhi
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak merangkap
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak ada kekerabatan
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	belum ada
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	sudah sesuai
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi selalu berusaha bersikap independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi berupaya melakukan perbaikan atas temuan
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi memberikan update kondisi perusahaan secara bulanan
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	selalu diupayakan agar tidak berat sebelah
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Tidak menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	sudah dilakukan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	masih terus dilakukan perbaikan
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	sudah ada tetapi belum dirincikan secara rinci
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	RUPS diadakan setiap satu tahun sekali
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	dibentuk buku tata tertib karyawan yang disebarluaskan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	selama ini dirangkum oleh notulen rapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	masih terus dilakukan perbaikan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	sudah sesuai jadwal pelaporan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	4	Terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Jumlah anggota komisaris 2 orang dan Direksi 1 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Sudah memenuhi
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sudah memenuhi
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR belum memiliki komisaris independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Sudah memenuhi
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Sudah memenuhi
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Tidak memiliki hubungan

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	tidak memiliki hubungan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	1,78	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,89	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Sudah memenuhi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	sudah dilakukan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	sudah sesuai
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	sudah dilakukan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	sudah dilakukan

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	sudah sesuai
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	sudah sesuai
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	sudah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	sudah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	tidak terdapat fungsi komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	tidak terdapat fungsi komite
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	tidak terdapat fungsi komite
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	tidak terdapat fungsi komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	tidak terdapat fungsi komite
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	sudah sesuai
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	sudah diupayakan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	selalu diupayakan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;  dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Sudah sesuai
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	sudah sesuai
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Sudah berjalan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	sudah dilakukan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Tercantum pada SOP kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	melakukan perbaikan melalui penyesuaian SOP dan kebijakan lainnya sesuai dengan POJK dan peraturan perundang undangan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	sudah dilakukan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah berjalan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	sudah dilakukan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah berjalan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	iya BPR menurunkan tingkat pelanggaran yang sifatnya tidak materiil dan relatif kecil

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	sudah sesuai
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Direksi patuh pada setiap peraturan OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Sudah ada
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Tercantum pada SOP audit Internal
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	sudah sesuai
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	sudah sesuai
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	sudah memnuhi
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	Tercantum pada SOP Audit Internal

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Lima Puluh Milyar Rupiah
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Sudah berjalan cukup baik
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Dilakukan review hasil audit dan dilakukan upaya perbaikan termasuk SDM
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Sudah Berjalan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sudah dilakukan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Lima Puluh Milyar Rupiah

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Sudah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	sudah sesuai
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	KAP masuk daftar pada OJK
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR melaporkan hasil keseluruhan dari audit KAP
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	sudah sesuai
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sudah sesuai

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Sudah dilakukan
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Tertuang pada SOP manrisk tetapi kurang memadai dan akan dilakukan pengkinian
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	Tertuang pada SOP manrisk
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	sudah dilakukan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	sudah dilakukan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	sudah berjalan tetapi masih dalam proses penyempurnaan
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	sudah dilakukan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sudah dilakukan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	sudah memenuhi
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	sudah sesuai
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,74	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah dilakukan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	akan dilakukan jika terdapat aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BMPK diatur pada SOP Perkreditan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	bank selalu berusaha melakukan pengkinian terhadap setiap kebijakan yang muncul
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	sudah diatur pada SOP Perkreditan BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah sesuai
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sudah sesuai

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	sudah sesuai
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sudah sesuai
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	sudah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	sudah sesuai
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	sudah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sudah sesuai
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	sudah sesuai
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sudah sesuai
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sudah sesuai
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sudah sesuai
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sudah sesuai
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sudah dilakukan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	sudah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



**LEMBAR PERSETUJUAN DIREKSI DAN DEWAN  
KOMISARIS**  
LAPORAN TATA KELOLA  
BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI  
Periode Pelaporan Desember Tahun 2022

Telah disahkan dan disetujui di Kudus, tanggal 25 Januari 2023

Menyetujui,

**Anita Adelina**  
Direktur Utama

Mengetahui,

**Tatang Sigit Mugiono**  
Komisaris

**Drs. H. Haryanto**  
Komisaris Utama

**Kantor Pusat :**

Jl. Raya Kudus - Colo Km.3 Bae, Kudus. Telp/Fax.0291.434637  
Email : bprmitrabudikusuma@gmail.com

**Kantor Kas :**

Jl. Raya Kudus - Jeparo, Jetak, Kaliwungu, Kudus. Telp. 0291.431210

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR**

<b>Nama BPR</b>	<b>PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri</b>
<b>Alamat BPR</b>	<b>Jl. Raya Kudus – Colo KM 3 Desa Purworejo, Bae, Kudus</b>
<b>Sandi Bank</b>	<b>601420</b>

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.374	0.269	0.000	0.260	0.180	0.168	0.038	0.168	0.128	0.143	0.143	<b>2</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

**Kesimpulan :**

Hasil penilaian penerapan Tata Kelola BPR menunjukkan nilai komposit "2" dan predikat komposit "Baik". Penerapan Tata Kelola tahun 2022 terdapat peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh pemenuhan Sistem & prosedur / kebijakan yang lebih memadai pada setiap unit kerja, dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengawasan langsung oleh Direksi.

**Kelemahan :**

Terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan Tata Kelola 2022, diantaranya :

1. Masih sama dengan tahun sebelumnya, terjadinya kekosongan jabatan Direktur Bisnis. BPR telah melakukan upaya melalui pencalonan Direksi, tetapi calon yang diajukan belum memenuhi kriteria Otoritas Jasa Keuangan.
2. Terjadinya benturan kepentingan pada fungsi kredit akibat kekosongan jabatan. Fungsi Loan Komite belum mampu berjalan, sehingga dibentuk pengawasan oleh tim penagihan melalui cek lingkungan sebelum kredit direalisasikan.

Adapun rencana tindak dari kelemahan tersebut antara lain, pemenuhan Direktur Bisnis pada tahun 2023. Dengan terpenuhinya jumlah anggota Direksi, Fungsi Loan Komite juga dapat kembali dijalankan.

**Kekuatan :**

Untuk kekuatan dari penerapan Tata Kelola 2022 antara lain :

1. Terdapat sistem & prosedur yang memadai di setiap unit kerja sehingga mendukung pelaksanaan tugas dari setiap fungsi unit kerja tersebut.
2. Pemantauan BMPK dilakukan kepada setiap debitur pada saat pengajuan kredit sehingga mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran BMPK. Dilakukan pula pelaporan terkait pelanggaran BMPK.
3. Adanya program rapat mingguan per bagian bersama anggota Direksi dan konsistensi terkait pembekalan SDM melalui pelatihan dan in house training sehingga meningkatkan kualitas SDM.
4. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris .


**Kudus, 23 Januari 2023**

**Direksi,  
PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri**

**Dewan Komisaris,  
PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri**



**Anita Adelina**  
Direktur Utama



**Tatang Sigit Mugiono**  
Komisaris



**Drs. H. Haryanto**  
Komisaris Utama